

Korupsi KONI Segera Masuk Kejaksanaan

PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar menyatakan hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009 sudah selesai diaudit. Bahkan hasil audit telah diserahkan ke Polda Kalbar sejak 9 April 2012 lalu. "Hasil audit kasus dugaan korupsi Bansos KONI telah selesai dan diserahkan ke Polda," ujar Sigit Pratama Yudha, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Kalbar, kemarin.

BPK RI Perwakilan Kalbar meluruskan pernyataan Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar yang mengatakan, kasus Bansos KONI masih menunggu hasil audit BPK. Menurut Sigit, hasil perhitungan kerugian daerah pada kasus tersebut dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar. Bahkan perhitungan kerugian daerah berdasarkan permintaan Polda Kalbar. Hasil audit telah selesai dilakukan dan telah diserahkan ke Polda Kalbar melalui surat keluar Anggota VI BPK RI Nomor 20/S/VIII/03/2012. "Hasil audit tersebut telah diterima

Polda Kalbar oleh Kasubdit III/TIP-IDKOR Dir Reskrimsus Polda Kalbar pada 9 April 2012 lalu," ungkap Sigit. Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar membenarkan Polda Kalbar telah menerima hasil audit dari BPK RI Perwakilan Kalbar. Saat ini Polda Kalbar masih melakukan pemberkasan, guna kelengkapan administrasi. Jika pemberkasan selesai, maka akan diserahkan ke Kejaksanaan. "Berkas sedang dilengkapi untuk persiapan tahap I. Jika pemberkasan siap, maka secepatnya akan diserahkan ke Kejaksanaan untuk dilakukan pemerik-

saan. Apakah terdapat kekurangan atau tidak. Jika tidak, maka berlanjut ketahap II atau P21," jelas Mukson. Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI Kalbar senilai Rp22,14 miliar, hingga kini penanganan kasusnya belum tuntas. Meski pengusutannya sudah berjalan sejak 2009 silam. Kasus pernah ditangani KPK-RI sebelum kembali diambil alih Polda Kalbar. Sementara dalam kasus Bansos KONI, Polda telah menetapkan seorang tersangka. Yaitu mantan wakil bendahara KONI, Iswanto.

Mencuatnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008. Termasuk audit dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008. BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion

■ Halaman 15

Korupsi KONI.....dari halaman 9

(DO) terhadap laporan keuangan tersebut. Penyebab DO, dikarenakan BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya. Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Dari hasil penelitian PDTT, BPK

Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat. Hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah. Keempat item itu, temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan. Uangnya digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada sekretariat dae-

rah sebesar Rp10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar. Serta yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 dan terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,11 miliar. (sul)